

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  
DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
KHASANAH, SIDOHARJO WONOGIRI**

(Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah Wonogiri)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

**YUSUF SHOLEKAN**  
**C 100 040 059**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil adalah dengan berkooperasi. Dengan adanya koperasi maka masyarakat ekonomi lemah dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Pengertian tentang koperasi telah dijelaskan di dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi, seperti yang tercantum dalam pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi berdasarkan pada asas kekeluargaan.<sup>1</sup>

Koperasi sendiri bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup> Di dalam pembangunannya koperasi perlu dikembangkan agar menjadi badan usaha yang maju dan dapat membantu masyarakat terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

---

<sup>1</sup> UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 1 Tentang Koperasi

<sup>2</sup> UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 3 Tentang Koperasi

UUD'45 setelah Amandemen menegaskan di dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. seperti Pasal 27, 33 dan 34. Pasal 27 menyatakan:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pamarintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 33 menyatakan sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 28 menyatakan sebagai berikut:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan Pasal yang amat penting karena Pasal ini menjadi landasan dan pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi. Bahwa masalah perekonomian dicantumkan dalam suatu Pasal di bawah bab

mengenai kesejahteraan sosial, mempunyai makna yang dalam dan menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan ekonomi nasional adalah untuk kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak dan bukan untuk perorangan atau suatu golongan. Dalam Pasal 33 UUD 1945 ini ditegaskan atas demokrasi ekonomi dalam perekonomian Indonesia.

Pemberian pinjaman modal kredit usaha masyarakat ekonomi lemah dengan prosedur mudah sederhana serta jaminan yang tidak terlalu memberatkan masyarakat sangat membantu masyarakat khususnya membuat masyarakat lebih tertarik meminjam uang kepada bank yang pada gilirannya akan dapat menghindarkan mereka dari praktek bank gelap atau rentenir.

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, koperasi lebih memasyarakat, dengan syarat-syarat yang mudah, bunga rendah atas dasar kepercayaan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, di dalam perjanjian kredit koperasi tentunya tidak terlepas dari jaminan, agar pihak koperasi yakin debitur benar-benar akan melunasi utangnya. Apabila debitur wanprestasi maka pihak koperasi berhak melakukan penuntutan. Dan mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan dalam pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi:<sup>3</sup>

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

---

<sup>3</sup> KUH Perdata Pasal 1267

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih jauh tentang perjanjian kredit.

Hal ini juga mengundang minat penulis untuk mengangkat dalam suatu karya tulis ilmiah tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul:  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH KHASANAH SIDOHARJO WONOGIRI.**

## **B. Pembatasan Masalah**

Masalah pelaksanaan perjanjian kredit sangat luas, di sini penulis hanya ingin membatasi dalam hal debitur wanprestasi. Sedangkan lokasinya penulis mengambil di koperasi jasa keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri.

## **C. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan penulis ketengahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi jasa keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri.
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi jasa keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri dan cara penyelesaiannya.

3. Apakah perjanjian kredit di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sidoharjo Wonogiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam syariat Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi jasa keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri
  - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi jasa keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri dan cara penyelesaiannya.
  - c. Untuk mengetahui apakah perjanjian kredit di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sidoharjo Wonogiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu menyusun karya ilmiah yang berbentuk skripsi guna memenuhi data sekaligus memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana strata satu (S-1) di bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian selain ditentukan dari metodologinya juga ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian yang dilakukan tersebut. Adapun manfaatnya dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi jasa keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri.
- b. Memberikan pengetahuan mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi jasa keuangan Syariah Sidoharjo Wonogiri dan cara penyelesaiannya.
- c. Memberikan pengetahuan apakah perjanjian kredit di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sidoharjo Wonogiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.

### **2. Manfaat Teoritis**

Menambah kepustakaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri untuk penulisan hukum tentang pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang berkompeten dalam usaha kredit dan simpan pinjam dengan prinsip syariah.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini dapat dimasukkan ke dalam bidang Hukum Perdata, dengan jenis penelitian yuridis sosiologis atau penelitian non doktrinal yaitu “penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer”.<sup>4</sup>

## **3. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “penelitian dengan cara menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.”<sup>5</sup>

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat diskriptif ini guna mengetahui gambaran secara nyata mengenai pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri.

---

<sup>4</sup> Soejono dan Abdulrachman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997 hlm. 56

<sup>5</sup> M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001 hlm 89



#### **4. Sumber Data**

- a. Sumber Data Primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung melalui penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu “sumber data yang digunakan untuk mendukung data pokok yang digunakan dalam melaksanakan dan penyusunan skripsi ini antara lain”.<sup>6</sup>
  - Bahan hukum primer yang terdiri dari KUHPerdara, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  - Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari dokumen-dokumen dalam realisasi kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri.
  - Bahan hukum tersier yaitu buku literatur, kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder.

##### **a. Studi Lapangan**

Yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Hal ini ditempuh

---

<sup>6</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997  
hlm 89

dengan cara mengadakan wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden guna memperoleh sejumlah data atau keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan para pejabat atau karyawan di lingkungan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo Wonogiri.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam studi kepustakaan ini penulis mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan serta menunjang materi yang diteliti.

c. Teknik Analisa Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan “tata cara penelitian yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan meneliti dan mempelajari obyek penelitian secara utuh”.<sup>7</sup> Hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1985 hlm 32

## **G. Sistematika Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi keseluruhan skripsi dalam empat bab, yaitu:

### **BAB I     PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

### **BAB II    TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
  - 3. Subyek dan Obyek Perjanjian
  - 4. Asas-asas Perjanjian
  - 5. Jenis-jenis Perjanjian
  - 6. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Kredit
  - 1. Pengertian Kredit
  - 2. Unsur-unsur Kredit
  - 3. Tujuan Kredit

4. Fungsi Kredit

- C. Tinjauan Umum tentang Koperasi

1. Pengaturan tentang Koperasi
2. Pengertian Koperasi
3. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi
4. Jenis-jenis Koperasi

- D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Keuangan Syariah

1. Sistem Pengimpunan Dana
2. Sistem Penyaluran Dana
3. Jasa Layanan Perbankan

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah Sidoharjo, Wonogiri.

- B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Khasanah
3. Apakah perjanjian kredit di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sidoharjo Wonogiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## BAB IV      PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA